

**ANALISIS DAMPAK PERDAGANGAN BEBAS TERHADAP
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH
(Studi Kasus: Provinsi Jawa Tengah)**

Prabowo Siswanto NIM. C2B607045

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H Miyasto, SU

NIP. 195012251975011001

Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas
Diponegoro
e-mail : prabowounited@yahoo.com

Abstract

Economic development is the main instrument for achieving national goals. There are many efforts towards the success of development, including trade liberalization and fiscal decentralization. Liberalization of trade (8 October 2003, AFTA), Fiscal Decentralization (1 January 2001). Economic growth of Central Java province from years has increased. However, uneven economic growth between the City.

The analytical tool used is Engle-Granger's Error Correction Models (EG-ECM). Econometric analysis shows free trade, economic growth, fiscal decentralization has positive influence on the development gap in the short and long term. Meanwhile, local taxes have a negative effect on inequality of development in the short and long term. Then, there are differences in inequality of development before and after the 1997 economic crisis in Indonesia. As a follow up to solve the problem of inequality of development, the provincial government needs to determine the appropriate strategy and policy.

Keywords : *Inquality Of Regional Development, Free Trade, Foreign Direct Investment, Economic Growth, Fiscal Decentralization, Local Taxes, Economic Crisis, Engle-Granger's Error Correction Models (EG-ECM)*

PENDAHULUAN

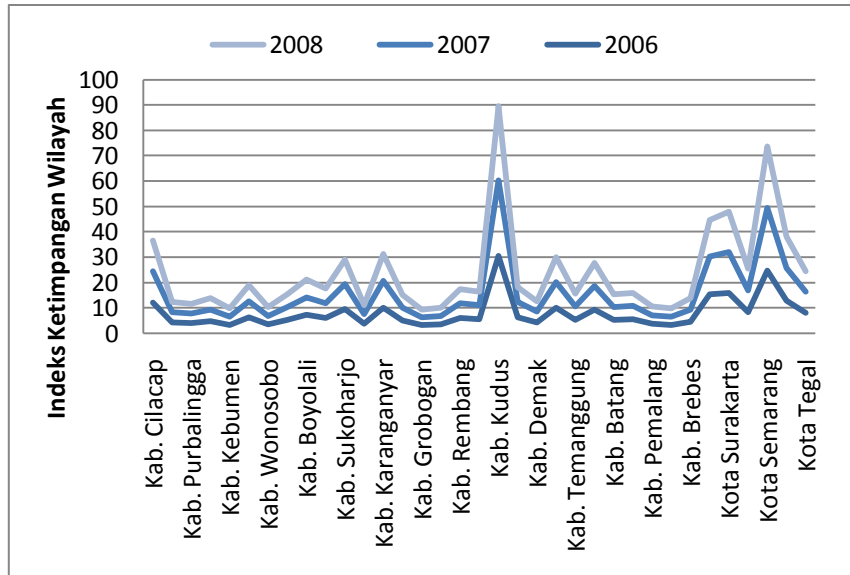
Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pembangunan antarwilayah (Todaro, 2000). Selama tiga dasawarsa perhatian utama pembangunan pada cara mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, baik negara maju/ kaya maupun negara terbelakang/ miskin, baik yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Akan tetapi untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional tersebut akan menghadapi banyak tantangan dan hambatan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tantangan dan hambatan tersebut semakin dirasa setelah berlakunya liberalisasi perdagangan di Indonesia (8 oktober 2003, AFTA) dimana sepakat mencapai target bea masuk dengan tariff 0% minimal 60%.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997-1998 telah membuka kesadaran akan pentingnya makna ketergantungan antara suatu Negara terhadap Negara lain yang membentuk suatu liberalisasi perdagangan (Mardiasmo, 2000). Hal ini, liberalisasi perdagangan bertujuan meningkatkan perdagangan antar Negara anggota ASEAN (*intra-ASEAN trade*), dan menarik lebih banyak penanaman modal asing (PMA), sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 Kabupaten/Kota, mempunyai perbedaan latar belakang (karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam) menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi, akibat terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

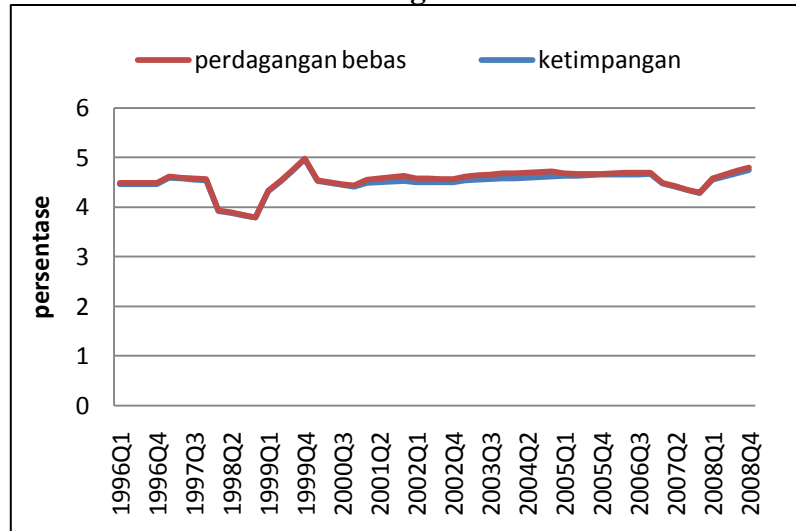
Gambar 1. Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Tengah



Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka dan Statistik Indonesia, diolah

Liberalisasi perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (Muhammad, 1995). Selama tahun 2006-2008 terjadi peningkatan aktifitas ekspor dan impor dari dampak kebijakan liberalisasi perdagangan, yang bermaksud meningkatkan pertumbuhan suatu daerah untuk mencapai kemakmuran. Namun, disamping itu terjadi peningkatan ketimpangan wilayah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. Ketimpangan Wilayah dan Perdagangan Bebas di Provinsi Jawa Tengah



Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka dan Statistik Indonesia, diolah

Teori Myrdal, ketimpangan wilayah berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah yang lainnya tetap terlantar. Ketidakmerataan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan ini, disebabkan karena adanya *backwash effect* yang lebih tinggi dibandingkan dengan *spread effect* (Jhingan, 1990).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak balik pada suatu wilayah salah satunya investasi. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Sedangkan, wilayah terbelakang lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di (Jhingan, 1990). Kelangkaan modal ini akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang. Peningkatan nilai investasi swasta yang berarti peningkatan kegiatan penanaman

modal akan mengakibatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kemakmuran penduduk sehingga ketimpangan akan menurun (Budiantoro, 2008).

Desentralisasi fiskal dicanangkan oleh pemerintah pusat (1 januari 2001), sebagai tuntutan perubahan sentralisasi (UU No.5 tahun 1974) berubah menjadi desentralisasi (UU No.22 tahun 1999), kemudian terjadi perubahan UU No.22 tahun 1999 menjadi UU No.32 tahun 2004, bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri diharapkan dapat mengurangi ketimpangan wilayah. Menurut Sjafrizal (2008), pelaksanaan desentralisasi, maka setiap daerah, dapat lebih berwenang untuk menggali potensi daerahnya untuk meningkatkan pertumbuhan daerahnya dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat pula dikurangi.

Penarikan pajak akan mengurangi daya beli masyarakat, namun pada akhirnya pajak digunakan kembali oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, sehingga disini peran pajak untuk menjaga kestabilan ekonomi sangat penting (Miyasto, dkk, 1990) oleh karenanya diperlukan struktur pajak yang baik.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka sangat menarik untuk menganalisis “Analisis Dampak Perdagangan Bebas Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi Kasus: Provinsi Jawa Tengah)”. Sedangkan periode pengamatan pada penelitian adalah tahun 1996-2008.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, antar sektor.

Menurut Sumitro Djohadikusumo (1987), bahwa pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural yakni perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi bertumpu pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan, pembangunan ekonomi mengandung pengertian yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pada umumnya, pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat permulaan,

pembangunan ekonomi dibarengi pula dengan pertumbuhan dan sebaliknya (Irwan dan Suparmoko, 1988).

Liberalisasi Perdagangan

Perdagangan internasional merupakan suatu cerminan dari negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Dewasa ini, hampir tidak ada satu negarapun di dunia ini yang menganut sistem perekonomian tertutup, hal ini disebabkan karena setiap negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan penduduknya sendiri. Perbedaan dalam anugerah alam (*endowment resources*) dan berbagai perbedaan lain menyebabkan suatu negara memerlukan adanya pertukaran atau perdagangan dengan negara lain.

Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya *The Wealth of Nation*, menyatakan bahwa perdagangan bebas sebagai suatu kebijakan yang paling baik untuk negara-negara di dunia. Smith berpendapat bahwa suatu negara akan menghasilkan dan mengekspor barang dimana negara tersebut mempunyai keunggulan absolut atas negara lain. Sebaliknya, negara tersebut akan mengimpor barang bilamana negara tersebut mempunyai kerugian absolut dalam memproduksi barang-barangnya. Keuntungan mutlak diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam perhari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang.

Teori keunggulan komparatif Ricardo melakukan perbaikan atas teori keunggulan absolut yang belum dapat menjawab permasalahan yaitu, jika terdapat negara yang tidak memiliki keunggulan absolut dapat melakukan perdagangan. Sehingga, menurut Ricardo, keunggulan dari masing-masing negara yang melakukan perdagangan dalam konsep tersebut bersifat relatif, tidak absolut seperti dikemukakan

oleh Smith sehingga negara yang tidak mempunyai keunggulan absolut dapat melakukan perdagangan.

Menurut Muhammad Sood, (1995), liberalisasi perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dan memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan

Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dan memberikan sumbangan yang berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan (Sood 1995).

Investasi merupakan salah satu sumber dana pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Adanya akumulasi modal dapat memungkinkan meningkatnya output dan pendapatan di masa yang akan datang sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi akan mengalir ke wilayah dengan *rate of return* yang tinggi serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga investasi akan terkonsentrasi ke wilayah dengan kriteria tersebut. Investasi yang terkonsentrasi tanpa adanya pemerataan akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi akan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah dengan konsentrasi ekonomi yang rendah (Srafizal 2008). Hal ini akan menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah.

Menurut Myrdal (Jhingan, 1993) menyatakan bahwa investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya Investasi, dimana pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang,

permintaan akan investasi rendah karena Pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu Investasi khususnya investasi swasta Lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, kekuatan yang berperan Banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi Yang dimiliki oleh suatu daerah (Sjafrizal, 2008). Perbedaan inilah yang akan Menyebabkan ketidakmerataan antar wilayah menjadi semakin lebar.

Investasi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini digambarkan dengan semakin banyaknya investasi yang masuk ke dalam suatu wilayah akan meningkatkan output yang dihasilkan dan berakhir pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, semakin banyaknya investasi yang masuk ke suatu wilayah (kaya sumber daya) justru akan menyebabkan ketidakmerataan.

Aktivitas perdagangan dan investasi dinyakini sangat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dimana *multiplier effect* yang ditimbulkan sangat besar melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dan pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sector. Perdagangan dan investasi dapat menjadi pendorong lajunya perekonomian daerah dan meningkatnya kesejahteraan.

Penelitian Rui HAO dan Zheng WEI (2007) menunjukkan sebelum era reformasi liberalisasi perdagangan berhubungan negatif tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan di Cina. Sedangkan setelah era reformasi terjadi hubungan positif signifikan antara liberalisasi perdagangan, terhadap disparitas pendapatan di Cina. Sejalan dengan penelitian Marie DAUMAL (2010) bahwa terjadi hubungan positif signifikan antara liberalisasi perdagangan terhadap disparitas pendapatan di India.

Pertumbuhan Ekonomi

Suatu keberhasilan program pembangunan di negara berkembang sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya dan atau kecepatan tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional yang dihasilkan. Namun, perhatian utama pembangunan melalui cara mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi ini, di sisi lain terdapat penyebaran pertumbuhan pendapatan tersebut masih sangat terbatas jangkauannya, kekuatan antara daerah/wilayah di Negara berkembang tidak seimbang, sehingga cenderung memperlebar jurang kesenjangan atau ketidakmerataan antara daerah/wilayah kaya dan daerah/wilayah miskin.

Simon Kuznets mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Hal tersebut digambarkan dalam kurva Kuznets gambar 1.1, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif.

Desentralisasi Fiskal

UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang diharapkan membawa dampak terhadap pelaksanaan pembangunan dengan sasaran yaitu kesejahteraan masyarakat, karena memang rentangnya yang terlalu panjang. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan (*expenditure*) secara mandiri

Dalam sistem keuangan Negara, pajak merupakan bagian yang cukup penting sebagai penerimaan Negara dalam anggaran suatu Negara (Pandiangan, 2002). Indonesia telah lama menempatkan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 diamanatkan bahwa “segala pajak untuk keperluan Negara

berdasarkan undang-undang”. Ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan para pendiri Negara (*founding father*) telah menempatkan pajak dalam konstitusi Negara. Walaupun penarikan pajak akan mengurangi daya beli masyarakat, namun pada akhirnya pajak digunakan kembali oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, sehingga disini peran pajak untuk menjaga kestabilan ekonomi sangat penting (Miyasto, dkk, 1990) oleh karenanya diperlukan struktur pajak yang baik.

Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, yang diawali dengan krisis nilai tukar terhadap dolar AS dan krisis moneter, telah mengakibatkan perekonomian di Indonesia mengalami suatu resesi ekonomi yang besar dan lama. Krisis ini berbeda dengan krisis ekonomi sebelumnya yang pernah dialami Indonesia sejak orde baru, sangat berpengaruh negatif terhadap semua kegiatan ekonomi di dalam negeri (Thulus, 1999;171).

Ketidakmerataan distribusi pembangunan merupakan masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan. Untuk dapat menganalisis ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Tengah, kita dapat melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya antara lain faktor perdagangan bebas, investasi asing langsung, dan desentralisasi fiskal, pajak daerah, krisis ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data runtun waktu (*time series*) tahunan. Periode yang digunakan adalah dari data kuartalan tahun 1996 sampai 2008 dalam bentuk kuartalan. Data yang diperoleh dari publikasi statistik Indonesia yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik, statistik ekonomi dan keuangan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bila data kuartal tidak tersedia maka data yang

bersangkutan diturunkan dari data tahunan dengan metode interpolasi (Insunkindro, 1984). Rumus interpolasi linear adalah sebagai berikut :

$$Q_{kt} = \frac{1}{4} Y_t \{1 + (k - 2,5) (1 - B) / 4\}$$

Dimana :

- k : 1, 2, 3, 4
- Q_t : data kuartalan ke k tahun t
- Y_t : data tahun t
- B : operasi kelambanan (*backward lag operation*)

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Ketidakmerataan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Penelitian ini menggunakan indikator sesuai yang telah digunakan oleh Jaime Bonet (2006).

2. Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas di sini diartikan sebagai kesepakatan/ hubungan kerjasama penentuan tarif dan kuota perdagangan yang rendah/ nol, sehingga perdagangan internasional akan meningkat melalui kenaikan ekspor maupun impor. Penelitian ini menggunakan indikator sesuai yang telah digunakan oleh Jaime Bonet (2006), Marie Daumal (2010), dan Rui HAO dan Zheng WEI (2007) bahwa “*this variable is the sum exports and imports in percentage of GDP in a given year t*”.

3. Investasi Asing Langsung

Investasi asing langsung adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing dalam bentuk investasi langsung. Penelitian ini menggunakan indikator sesuai yang telah digunakan oleh Marie Daumal

(2010), dan Rui HAO dan Zheng WEI (2007) bahwa “*the variable foreign direct investment is the net inflows of foreign direct investment in percentage of the GDP*” in a given year t ”.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang penekanannya pada aspek proses, output per kapita, dan jangka waktu. Penelitian ini menggunakan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah. PDRB yang dimaksud adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dan dinyatakan dalam juta rupiah, yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Simon Kuznets (1995) dan Sutarno dan Mudrajat Kuncoro (2003).

5. Desentralisasi Fiskal

Derajat mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penerimaan yaitu share penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah untuk mengukur derajat desentralisasi daerah yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Suparmoko (1987;320-325) dan Sukanto (2000).

6. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan perbandingan antara jumlah pajak yang dapat dihimpun oleh pemerintah dengan GDP pada suatu waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pajak daerah tingkat propinsi pada persentase dari PDRB di Provinsi Jawa Tengah yang diberikan pada tahun t , yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Siti Parhah (2006).

7. Krisis Ekonomi

Dalam penelitian ini variabel krisis ekonomi adalah proksi dengan menggunakan variabel binary dengan kriteria nilai “0” disebut *excluded group* yaitu kondisi ekonomi negara sedang stabil, dan nilai “1” disebut *included group* yaitu kondisi ekonomi negara sedang tidak stabil. Pada penelitian terdahulu variabel ini telah digunakan oleh Tantia (2002).

Alat Analisis

Banyak usaha dan pendekatan telah dilakukan untuk membentuk model dinamis, namun sampai saat ini belum ada *consensus* yang umum bagaimana membentuk model dinamis yang baku. Hal ini karena deskripsi dari model dinamis dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perilaku agen-agen ekonomi, faktor psikologis, faktor teknis, peranan otoritas ekonomi, faktor kelembagaan, dan pandangan pembuat model terhadap fenomena nyata yang dihadapinya. Di sisi lain, teori ekonomi juga tidak terlalu banyak bercerita tentang model dinamis (jangka pendek), tetapi lebih emusatkan pada perilaku variabel dalam keseimbangan atau dalam jangka panjang (Gujarati, 2003:656-663; Thomas, 1997:313-319).

Spesifikasi Model

Model yang akan dianalisis dalam penelitian ini mengacu dan dimodifikasi dari model Jaime Bonet (2006), Rui HAO dan Zheng WEI (2007), dan Marie DAUMAL (2010). Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk log linear (*log-linier*). Alasan pemilihan model logaritma natural (Imam Ghazali, 2005) adalah 1) Menghindari adanya heteroskedastisitas, 2) Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas, 3) Mendekatkan skala data. Sehingga persamaan (1.4) akan menjadi persamaan (1.5) sebagai berikut :

$$Liq_t = \alpha_0 + \alpha_1 Lopenness_t + \alpha_2 Lfdi_t + \alpha_3 Lpe_t + \alpha_4 Lfd_t + \alpha_5 Ltax_t + \alpha_6 dt_t + \mu_t \dots \dots \dots (1)$$

- Liq = Log iq
- $Lopenness$ = log openness
- $Lfdi$ = log fdi
- Lpe = log pe
- Lfd = log fd
- $Ltax$ = log tax

Dimana

- Iq = Ketimpangan Pembangunan Wilayah
- $openness$ = Perdagangan Bebas
- fdi = Investasi Asing Langsung
- fd = Desentralisasi Fiskal
- tax = Pajak Daerah
- dt = Krisis Ekonomi
- μ = *error term*

Pendekatan kointegrasi merupakan salah satu cara yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian ekonomi dalam rangka menghindari adanya regresi lancung. Jika menggunakan pendekatan kointegrasi maka syarat utama yang harus dipenuhi adalah variabel-variabel yang diamati mempunyai derajat integrasi yang sama, yang berarti bahwa variabel-variabel tersebut dalam jangka panjang mempunyai hubungan keseimbangan seperti yang dikehendaki oleh teori yang terkait dengan variabel-variabel tersebut (Engle and Granger, 1987:252-253). Namun jika variabel-variabel tersebut tidak mempunyai derajat integrasi yang sama maka digunakan pendekatan ECM (Wickens and Breusch, 1988:202-204). Dengan demikian cara lain yang dapat digunakan untuk menghindari regresi lancung adalah dengan memasukkan lebih banyak variable kelambanan baik variabel tergantung maupun variabel bebas. Dengan kata lain perlu dibentuk model dinamis, seperti PAM, ECM, I-ECM (Thomas, 1997:377-381, Sugiyanto, 1994:73, Insukindro, 1991:76-77).

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan ECM. Pemilihan model dengan pendekatan ECM didasarkan bahwa jika nilai koefisien ECT

signifikan maka berarti terdapat indikasi bahwa antara variabel ketimpangan pembangunan, perdagangan bebas, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, pajak daerah dan krisis ekonomi memiliki hubungan kointegrasi, spesifikasi modelnya benar, teorinya benar, dan terdapat hubungan kausalitas paling tidak hubungan satu arah (Thomas, 1997:383-390).

Model dasar persamaan (1) dibentuk Model ECM (*disequilibrium short run relationship*) sebagai berikut:

$$DLIQ_t = \beta_0 + \psi U_{t-1} + \beta_1 DLOpenness_t + \beta_2 DLfdi_t + \beta_3 DLpe_t + \beta_4 DLfd_t + DLtax_t + V_t \dots\dots\dots(2)$$

Model ECM jangka panjang (*disequilibrium long run relationship*) dapat ditulis sebagai berikut.

$$LIQ_t = \alpha_0 + \alpha_1 Lopenness_t + \alpha_2 Lfdi_t + \alpha_3 Lpe_t + \alpha_4 Lfd_t + \alpha_5 Ltax_t + \alpha_6 dt + u_t \dots\dots\dots(3)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Stasioneritas

Uji uji stasioneritas data, dimaksudkan untuk mengamati apakah koefisien tertentu dari model autoregresif yang ditaksir mempunyai nilai satu atau tidak. Jika data yang digunakan tidak stasioner maka regresi yang ditaksir merupakan regresi lancung (Gujarati, 1995). Karena distribusi yang tidak baku dalam model autoregresif menyebabkan uji t dan uji f tidak cukup layak. Data yang belum stasioner pada level kemudian akan dilakukan uji derajat integrasi satu. Tabel 1 menunjukkan hasil dari uji derajat intaegrasi, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Uji Derajat Integrasi

Variabel	ADF stat.	Critical Values		Prob
		1%	5%	
<i>Inquality</i>	-7.75	-3.58	-2.93	0.0000
<i>Openness</i>	-5.01	-3.58	-2.93	0.0001
<i>Fdi</i>	-6.01	-3.568	-2.92	0.0000
<i>Growth</i>	-11.26	-3.61	-2.94	0.0000
<i>Decentralization</i>	-4.46	-3.58	-2.93	0.0008
<i>Tax</i>	-4.90	-3.57	-2.92	0.0002
<i>Binary</i>	-7.07	-3.57	-2.92	0.0000

Sumber : Hasil olahan Eviews 6,1.

Dari hasil uji derajat integrasi ditunjukkan bahwa variabel ketimpangan pembangunan, perdagangan bebas, investasi asing langsung, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, pajak, dan krisis ekonomi stasioner pada derajat satu.

Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa variabel yang digunakan dalam model memiliki derajat kointegrasi yang sama. Dari hasil pengujian seluruh data dalam penelitian ini memiliki derajat integrasi yang sama, yaitu derajat satu, maka uji kointegrasi dapat dilakukan. Hasil kointegrasi pada model regresi bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi

Model	ADF stat.	Critical Values		Prob*
		1%	5%	
<i>Inquality</i>	-9.09	-2.61	-1.95	0.0000

Sumber : Hasil olahan Eviews 6,1.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *residual* ternyata stasioner pada tingkat *level*. Hal ini terlihat dari nilai *ADF statistic* sebesar -5.24106 jauh lebih kecil dari nilai kritis *Mc Kinnon* baik dalam taraf 1,5 persen, sehingga stasioner pada tingkat

level. Dengan demikian terbukti bahwa terdapat kointegrasi dalam model sehingga perumusan ECM dapat dilanjutkan.

Model ECM Engel-Granger

Model ECM pada Tabel 5 menunjukkan koefisien ECT(-1) signifikan dalam model terdapat indikasi bahwa antara variabel ketimpangan pembangunan, perdagangan bebas, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, pajak daerah dan krisis ekonomi terdapat kointegrasi, spesifikasi modelnya benar, teorinya benar, dan terdapat hubungan kausalitas, sehingga tidak ada alasan untuk menolak model ECM tersebut.

Tabel 3. Hasil Regresi Model ECM

Variabel	Koefisien	t-Stat.	Prob.
<i>Intercept</i>	0.006767	2.203219	0.0330
<i>Openness</i>	0.008563	2.232007	0.0309**
<i>Fdi</i>	-0.004800	-1.933546	0.0598
<i>Growth</i>	0.017729	4.618596	0.0000*
<i>Decentralization</i>	2.538803	7.082489	0.0000*
<i>Tax</i>	-0.156594	-3.647355	0.0007*
<i>Binary</i>	0.064389	2.732866	0.0091*
<i>resid(-1)</i>	0.556088	4.036943	0.0002*

Keterangan :

$R^2 = 0.812923$

LM Test = 3.011552 Prob. 0.2218

F-stat. 26.69306 Prob. 0.000000

White Test = 41.16532 Prob. 0.0519

J-Bstat = 2.010821 Prob. 0.365894

Variabel dalam bentuk *first difference* yang menunjukkan adanya signifikansi pada $\alpha=5\%$ adalah perdagangan bebas, sedangkan variable investasi asing, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, pajak daerah dan krisis ekonomi signifikan pada $\alpha=1\%$.

Hasil R^2 adalah sebesar 0.81, berarti 81.29% variasi ketimpangan pembangunan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel perdagangan bebas, investasi

asing, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, pajak daerah, dan krisis ekonomi. Sebesar 18.70 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Regresi pengaruh perdagangan bebas, investasi asing langsung, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, pajak, dan krisis ekonomi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Jawa Tengah tahun 1996-2008 yang menggunakan *two test regression*, taraf keyakinan 99 persen ($\alpha=1$ persen) dan taraf keyakinan 95 persen ($\alpha=5$ persen), maka diperoleh F-tabel ($\alpha=5$ persen) sebesar 3,51, sedangkan pada diperoleh F-tabel ($\alpha=5$ persen) sebesar 2,45. Dari hasil regresi pengaruh perdagangan bebas, investasi asing langsung, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, pajak, dan krisis ekonomi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Jawa Tengah tahun 1996-2008 diperoleh F-statistik sebesar 26.69306 dan nilai probabilitas F-statistik (0.000000). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian koefisien regresi secara individual dilihat dari signifikansi t-statistik menggunakan *two test regression*. Uji t bertujuan melihat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

Maka, dapat diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, pajak daerah, krisis ekonomi, *resid(-1)* secara signifikan mempengaruhi variabel ketimpangan pembangunan wilayah dalam taraf nyata 1%, dan 5%. Sedangkan pada variabel perdagangan bebas secara signifikan mempengaruhi variabel ketimpangan pembangunan wilayah dalam taraf nyata 5%. Kemudian, variabel investasi asing langsung tidak mempengaruhi variabel ketimpangan pembangunan wilayah dalam taraf nyata 1%, dan 5%.

Tabel 4. Hasil Temuan Empirik

Variabel	Temuan Empirik			
	Jangka Pendek		Jangka Panjang	
	Makna Statistik	Korelasi	Makna Statistik	Korelasi
Perdagangan Bebas	Signifikan	+	Signifikan	+
Investasi Asing	Tidak Signifikan	-	Tidak Signifikan	-
Pertumbuhan Ekonomi	Signifikan	+	Signifikan	+
Desentralisasi Fiskal	Signifikan	+	Signifikan	+
Pajak Daerah	Signifikan	-	Signifikan	-
Krisis Ekonomi	Signifikan	+	Signifikan	+

Sumber : Hasil olahan Eviews 6,1 (Lampiran).

Standardized Coefficients Jangka Panjang

Pengaruh dengan koefisien *standardize* yang besar menghasilkan pentingnya dalam memprediksi *frequency cell* dibandingkan dengan koefisien yang kecil (Imam Ghozali, 2006;115).

- *Inquality function* untuk Unstandardized Coefficients

$$E(Y_t) / D_t=0 = 1.724729 + 0.007885openness_t + (-0.005310)logfdi + 0.023995logpe_t + 1.707840fd_t + (-0.043388)tax_t + 0.116dt \dots \dots \dots (4)$$

- *Inquality function* untuk Standardized Coefficients

$$E(Y_t) / D_t=1 = 0.152openness_t + (-0.119)fdi + 0.295pe_t + 0.810fd_t + (-0.718)tax_t + 0.968dt \dots \dots \dots (5)$$

Pengaruh besarnya koefisien *standardize* menghasilkan pentingnya dalam memprediksi *frequency cell*, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien β_5 (desentralisasi fiskal) merupakan nilai terbesar, bahwa dalam jangka panjang, penyebab utama meningkatnya ketimpangan pembangunan adalah desentralisasi

fiskal, kemudian perdagangan bebas. Sedangkan variabel yang dapat meredam ketimpangan pembangunan adalah pajak daerah.

KESIMPULAN

1. Tingkat Ketimpangan Wilayah di ketimpangan pembangunan wilayah di Jawa Tengah diukur selama periode penelitian tahun 1996-2008 cenderung mengalami peningkatan.
2. Variabel perdagangan bebas, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, pajak, dan krisis ekonomi terbukti secara signifikan mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Jawa Tengah, hanya variabel investasi asing saja, yang tidak berpengaruh secara signifikan. Namun hasil penelitian menunjukkan kesesuaian arah yaitu dalam jangka panjang variabel perdagangan bebas, pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, dan krisis ekonomi berpengaruh signifikan secara positif. Sedangkan pajak berpengaruh signifikan secara negatif terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Jawa Tengah.

SARAN

1. Variabel kebijakan (perdagangan bebas dan desentralisasi fiskal) secara fundamental bertanggung jawab dari peningkatan ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga, perlunya peran pemerintah dalam mengatur kebijakan-kebijakan yang mendukung penurunan ketidakmerataan pembangunan. Perlunya perhatian pemerintah secara serius untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi terutama untuk pemeratakan pembangunan dan PDRB perkapita penduduk di kabupaten/ kota yang ada. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat atau sentra ekonomi di daerah melalui pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Persaingan yang semakin ketat antar negara di dunia (iklim investasi) melalui *policy framework* yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tuntutan

investor. Hal ini harus didukung oleh *economic determinant* dan *non economic determinant* yang lebih kondusif. Integrasi perekonomian dunia akan mendorong setiap negara untuk menciptakan aktifitas ekonomi yang didasarkan pada pasar (*market oriented*), Investor tidak lagi menjadikan *comparative advantage* suatu negara sebagai pijakan dalam melakukan investasi di negara lain sebagaimana yang terjadi pada dekade 1980-an. Mereka lebih berfokus pada *competitive advantage* dalam pasar global. Namun hal ini, perlu peraturan yang mana investasi tidak ditujukan pada daerah/wilayah yang kaya akan sumber, sehingga masalah ketidakmerataan pembangunan dapat teratasi.

3. Konsolidasi antar daerah atau kabupaten/ kota dengan pemerintahan provinsi perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara menyeluruh sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dan ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi dapat diminimalisir.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfirman, Sutisno, 2006. *Foreign Direct Investment And Regional Income Inequality In China*. Jurnal Keuangan Publik, Hal. 25 - 66, Vol. 4, No.1. Yogyakarta.
- Andri, 2008. *Pengaruh GAP Anggaran Indonesia Dan GAP Tabungan-Investasi Jepang Dan Amerika Terhadap Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 1978-2005*. Skripsi Program Sarjana (S1) Universitas Diponegoro Semarang, Tidak Dipublikasikan.
- Arief, Sritua. 2010. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Arsyad, Lincoln. 1997. *Pengantar Perencanaan Dan Ekonomi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.

- Astuti, Dwi. 2005. *Dampak Liberalisasi Keuangan Dan Perdagangan Internasional Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1970-2002*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Hal. 13 - 30, Vol. 10, No.1. Fakultas Ekonomi UPN Veteran. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Produk Domestik Bruto di Indonesia*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- . *Statistik Indonesia*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- . *Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Bird, Richard M., Robert Ebel dan Christine Wallich, 1995. *Decentralization Of The Socialist State: Intergovernmental Finance In Transition Economics*. Washington DC. Word Bank.
- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Bonet, Jaime, 2006. *Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from The Colombian Experience*. Edificio Banco de la República, El Centro Plaza de Bolivar, Hal 662-675.
- Budiantoro, 2008. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tidak Dipublikasikan.
- Damodar Gujarati, 2004. *Basic Econometrics Fourth Edition*. Penerbit United States Military Academy, New York.
- Damodar Gujarati, 2003. *Basic Econometrics Three Edition*. Penerbit United States Military Academy, New York.
- Daumal, 2006. *The Impact Of Openness On Regional Inequality: Cases Of India And Brazil*. Document de travail, Hal 4-29.
- Eni. Siti, 2007. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri Di Jawa Tengah Tahun 1980-2002*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Hal. 62 - 84, Vol. 8, No.1. Badan Penerbit Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Firmansyah, 2006. *Aplikasi Econometric Views (Eviews) V. 3.0-4.1*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Ghozali, Imam, 2006, *Analisis Multivariate Lanjutan SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- HAO dan WEI, 2007. *Fundamental Causes of Inland-coastal Income Inequality in Post-reform China*. CERDI, Université d'Auvergne, 65 Boulevard François Mitterrand hal 1-29.
- Hendra Esmara, 1988. *Memelihara Momentum Pembangunan*. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.
- Insunkindro, 1991. *Model Koreksi Kesalahan Untuk Permintaan Impor Bahan Bakar Minyak Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Tahun VI No.1. Badan Penerbit Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Insunkindro, 1992. *Komponen Koefisien Regresi Jangka Panjang Model Ekonomi: Sebuah Studi Kasus Impor Barang di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Tahun VII No.1. Badan Penerbit Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Insunkindro, 1992. *Pendekatan Kointegrasi Dalam Analisis Ekonomi: Studi Kasus Permintaan Deposito Dalam Valuta Asing Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.1, No.2. Badan Penerbit Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Insunkindro, 1992. *Pembentukan Model Dalam Penelitian Ekonomi*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Tahun VII No.1. Badan Penerbit Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Insunkindro, 1998. *Sindrum R^2 Dalam Analisis Regresi Linier Runtun Waktu*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Hal. 1 - 11, Vol. 13, No.1. Badan Penerbit Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Jhingan. 2010. *Ekonomi Pemabangunan Dan Perencanaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leesmann, Christian, 2006. *Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries*. Ifo Working Paper No. 25, hal 1-32. dari www.ifo.de.
- Leesmann, Christian, 2006. *Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A Evidence from Cross-section and Panel Data*. Dresden Discussion Paper in Economics No.08/09, Hal 1-29. dari <http://rcswww.urz.tu-dresden.de/wpeconomics/index.htm>.

- Sasana, Hadi, 2005. *Analisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiscal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Antar Wilayah, Antar Sector Di Kabupaten/Kota Propinsi DIY*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Hal. 249 - 268, Vol. 12, No. 2.
- Mankiw N. Gregory, 1999. *Macroeconomics. 4th Edition*, Worth Publisher, 41 Madison Avenue, New York.
- Mankiw, Gregory, 2000, *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta : Erlangga.
- Mankiw, Gregory, 2000, *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta : Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta : AMP YKPN.
- Kusumastuti, Ratih, 2008. *Analisis Foreign Direct Investment Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia Tahun 1981-2006*. Skripsi Program Sarjana (S1) Universitas Diponegoro Semarang, Tidak Dipublikasikan.
- Leonita, 2008. *Dampak Penerapan Desentralisasi Fiscal Terhadap Pertumbuhan Dan Ketimpangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota Pada Barkolin I Propinsi Jawa Tengah*. Skripsi Program Sarjana (S1) Universitas Diponegoro Semarang, Tidak Dipublikasikan.
- Lestiyoadi, Sekti, 2008. *Analisis Factor-Faktor Yangmempengaruhi Tabungan Perbankan Di Indonesia (Pendekatan Error Correction Model)*. Tesis Program Magister Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (S2) Universitas Diponegoro Semarang, Tidak Dipublikasikan.
- Pamuji, Teguh, 2008. *Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro Di Indonesia (Tahun 1993 -2007)*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tidak Dipublikasikan.
- Parhah, Siti 2006. *Pengaruh Variable Makroekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta, Tidak Dipublikasikan.
- Philips, dan Woller, Garry, 1997. *Does Fiscal Decentralization Lead to Economic Growth?*. Working Paper, number 97-7, September, 1-13.
- Purnomo, Didit, 2000. *Distribusi Pendapatan di Indonesia : Proses Pemerataan dan Pemiskinan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Hal. 47 - 59, Vol. 1, No.1.

- Prakoso, Adiyanto 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Deposito Berjanka Pada Bank Umum Di Indonesia*. Skripsi Program Sarjana (S1) Universitas Diponegoro Semarang, Tidak Dipublikasikan.
- Prayitno, Hadi. 1986. *Pengantar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiarto. 2002. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan di Propinsi Jateng. Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi STIE Stikubank.
- Selvanathan. 2005. *Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A Panel Data Approach for OECD Countries*. Griffith University Nathan, Queensland Australia.
- Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan*, 1985, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Bima Grafika.
- Sukirno, Sadono. 1998. *Makro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sriaditya. 2010. *Analisis Ketimpangan Antar Wilayah Dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dengan Model Panel Data (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2007)*. Skripsi Program Sarjana (S1) Universitas Diponegoro Semarang, Tidak Dipublikasikan.
- Teguh Prayitno, 2008. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Kebumen Tahun 2000-2006*. skripsi Program Sarjana (S1) Universitas Diponegoro Semarang, Tidak Dipublikasikan.
- Todaro, Michael P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P, 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Terjemahan Haris Munandar dan Puji A.L. Jakarta: Erlangga.
- Triyanto, Suseno. 1990. *Indikator Ekonomi*. Jakarta: Kanisius.
- Umar, Husein. 2002. *Research Methods In Finance And Banking*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Veronika, 2003. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tidak Dipublikasikan.
- Waluyo, Joko, 2007. *Dampak Desentralisasi Fiscal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah Di Indonesia*. Depok : Wisma Makara.
- Waluyo, Joko, 2007. *Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Studi Lintas Negara*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Hal. 1-20.
- Wibowo, Sekti, 2005. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Di Indonesia (Pendekatan Error Correction Model)*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tidak Dipublikasikan.
- Widiarto, 2001. *Ketimpangan, Pemerataan dan Infrastruktur*. widoarto@bandung2.wasantara.net.id.
- Widarjono, Agus, 2005, *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Ekonisia Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.

LAMPIRAN 1 Uji Akar Unit

Variable Inquality

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.848424	0.3532
Test critical values:		
1% level	-3.577723	
5% level	-2.925169	
10% level	-2.600658	

Variable Openness

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.935934	0.3136
Test critical values:		
1% level	-3.568308	
5% level	-2.921175	
10% level	-2.598551	

Variable Fdi		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.470455	0.1285
Test critical values: 1% level	-3.565430	
5% level	-2.919952	
10% level	-2.597905	

Variable Growth		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.560788	0.1083
Test critical values: 1% level	-3.577723	
5% level	-2.925169	
10% level	-2.600658	

Variable Decentralization		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.123533	0.2366
Test critical values: 1% level	-3.565430	
5% level	-2.919952	
10% level	-2.597905	

Variable Tax		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	1.489400	0.9991
Test critical values: 1% level	-3.565430	
5% level	-2.919952	
10% level	-2.597905	

Variable Binary

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.845648	0.3548
Test critical values: 1% level	-3.565430	
5% level	-2.919952	
10% level	-2.597905	

LAMPIRAN 2 Error Corection Model

Dependent Variable: D(LOG(IQ))

Method: Least Squares

Date: 02/28/11 Time: 09:03

Sample (adjusted): 1996Q2 2008Q4

Included observations: 51 after adjustments

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.006767	0.003071	2.203219	0.0330
D(LOG(OPENNESS)	0.008563	0.003836	2.232007	0.0309
D(LOG(FDI))	-0.004800	0.002483	-1.933546	0.0598
D(LOG(PE))	0.017729	0.003839	4.618596	0.0000
D(LOG(FD))	2.538803	0.358462	7.082489	0.0000
D(LOG(TAX))	-0.156594	0.042934	-3.647355	0.0007
D(DT)	0.064389	0.023561	2.732866	0.0091
RESID01	0.556088	0.137750	4.036943	0.0002
R-squared	0.812923	Mean dependent var		0.001192
Adjusted R-squared	0.782468	S.D. dependent var		0.035227
S.E. of regression	0.016430	Akaike info criterion		5.236335
Sum squared resid	0.011607	Schwarz criterion		4.933303
Log likelihood	141.5265	Hannan-Quinn criter.		5.120537
F-statistic	26.69306	Durbin-Watson stat		1.601258
Prob(F-statistic)	0.000000			